



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
YANG TIDAK BERSIFAT FINAL  
ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

**FORMULIR 1721 - VI**

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan

Nomor : 1312240000264

Masa Pajak - Tahun Pajak : 12 - 2024

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : 921536751412000 / 3276022606910010 2. NIK/NO.PASPOR : -  
3. NITKU : 3276022606910010000000  
4. NAMA : FADHLAN DIMAS HINDAMI  
5. ALAMAT : BUKIT CENGKEH I JL NUSANTARA RAYA  
6. WAJIB PAJAK : ☐ YA 7. KODE NEGARA DOMISILI : -  
LUAR NEGERI

**B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG**

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21-100-03	8.143.200	8.143.200	<input type="checkbox"/>	1	81.432

**C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI :**

**D. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : 764184974041000 / 0764184974041000 5. TANGGAL & TANDA TANGAN  
2. NITKU : 0764184974041000000000 31/12/2024  
3. NAMA : NEO PRIMA EDUKASI  
4. NAMA PENANDATANGAN : CHANDRA LIEANATA, THE  
AT8FR3YY



**KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26**

**PPh PASAL 21 TIDAK FINAL**

- 21-100-03 Upah Pegawai Tetap
- 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Pemasaran Berjenjang
- 21-100-05 Imbalan Kepada Agen Asuransi
- 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
- 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli
- 21-100-09 Bukan Pegawai Lainnya
- 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Menerima Imbalan Secara Tidak Teratur
- 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
- 21-100-12 Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai
- 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
- 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

**PPh PASAL 26**

- 27-100-99 Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26